

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014. Program JKN bertujuan untuk membantu seluruh masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Beberapa prinsip yang dianut JKN yakni prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial (Suhanda, 2015).

Berdasarkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 19 ayat (1) tahun 2004, Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan dengan prinsip kegotongroyongan, kepesertaan bersifat wajib, iuran berdasarkan presentasi upah, dan dilakukan dengan prinsip nirlaba yang mempunyai dampak terhadap ekonomi masyarakat. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk kesehatan dan dapat menggunakannya untuk kebutuhan yang lain. Masyarakat yang belum menjadi peserta JKN dihibung agar mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN mandiri (PBPU) agar tujuan universal health coverage tercapai. Ada banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mau mendaftarkan dirinya menjadi peserta JKN. Perilaku kesediaan masyarakat menurut Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo (2007), faktor faktor yang mempengaruhi perilaku untuk menjadi peserta JKN dapat dipengaruhi oleh 3 (tiga) Faktor predisposisi (predisposing factor) yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya, Faktor pendukung (enabling factor) yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat steril dan sebagainya dan Faktor Penguat (Reinforcing Factor) Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku petugas termasuk petugas kesehatan. Undang-undang juga diperlukan untuk memperkuat perilaku masyarakat.

BPJS Kesehatan memiliki tiga sasaran pokok, salah satunya adalah tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional Tahun

2019. Akan tetapi hal tersebut tampaknya belum dapat tercapai berdasarkan data dari antaranews.com Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengatakan sebanyak 83 persen penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS. Jumlah peserta yang berada di angka 83 persen dari penduduk Indonesia itu mencapai hampir mencapai 224 juta jika disandingkan dengan data Dukcapil pada semester satu 2020 yang mencapai 268 juta jiwa lebih. Dan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melinda, Anneke Suparwati, Antono Suryoputro pada tahun 2016 mengenai Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Masyarakat Dalam Keikutsertaan BPJS Mandiri Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo mengungkapkan Dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa jumlah penduduk Data Kabupaten Purworejo adalah 805.812 orang. Sedangkan data dari BPJS pada Juni 2014, di Kabupaten Purworejo jumlah total peserta BPJS kesehatan adalah 345.466 orang, terdiri dari 258.635 orang peserta penerima bantuan iuran dari APBN, 49.134 orang pekerja penerima upah, 6.649 orang pekerja bukan penerima upah, 31.048 orang bukan pekerja. Berdasarkan penelitian sebelumnya kepesertaan di Kecamatan Bener Kabupaten purworejo masih cukup rendah dan minat masyarakat terhadap kepesertaan mandiri masih rendah juga. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Wahyu Dewi Hapsari, Kiki Natassia, Wahyu Riniasih pada tahun 2018 mengenai Analisis Minat Masyarakat Dalam Keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Desember tahun 2018 tercatat ada 502.879 dari 1.455.032 penduduknya belum menjadi peserta. Data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menjadi peserta JKN masih rendah.

Kesimpulan dari penelitian di atas dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Masyarakat Dalam Keikutsertaan BPJS Mandiri. Penelitian diatas juga dapat di simpulkan bahwa minat masyarakat untuk menjadi peserta JKN Mandiri masih rendah . Maka pelenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta mandiri.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana faktor faktor yang berhubungan dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS mandiri ?

1.3 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS mandiri.

1.4 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran faktor pengetahuan minat masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional
2. Untuk mengetahui gambaran faktor pendapatan minat masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional
3. Untuk mengetahui gambaran faktor tingkat pendidikan minat masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional
4. Untuk mengetahui gambaran faktor dukungan sosial minat masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai wujud dari pengaplikasian disiplin ilmu yang telah dipelajari sehingga dapat menambah wawasan dan pengembangan pengetahuan mengenai faktor yang berhubungan dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS mandiri

2. Bagi Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Hasil dari laporan ini dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen sebagai referensi belajar mengenai faktor yang berhubungan dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS mandiri

3. Bagi Mahasiswa/Pembaca

Dapat berguna menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan mengkaji masalah terkait tentang program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

4. Bagi masyarakat Umum

Dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan gambaran mengenai program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan faktor yang berhubungan dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS mandiri.

5. Bagi BPJS Kesehatan

Sebagai evaluasi untuk menanggulangi kendala program Jaminan Kesehatan Nasional untuk *Universal Health Coverage* dan memberikan wawasan kepada BPJS Kesehatan faktor yang berhubungan dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS mandiri.